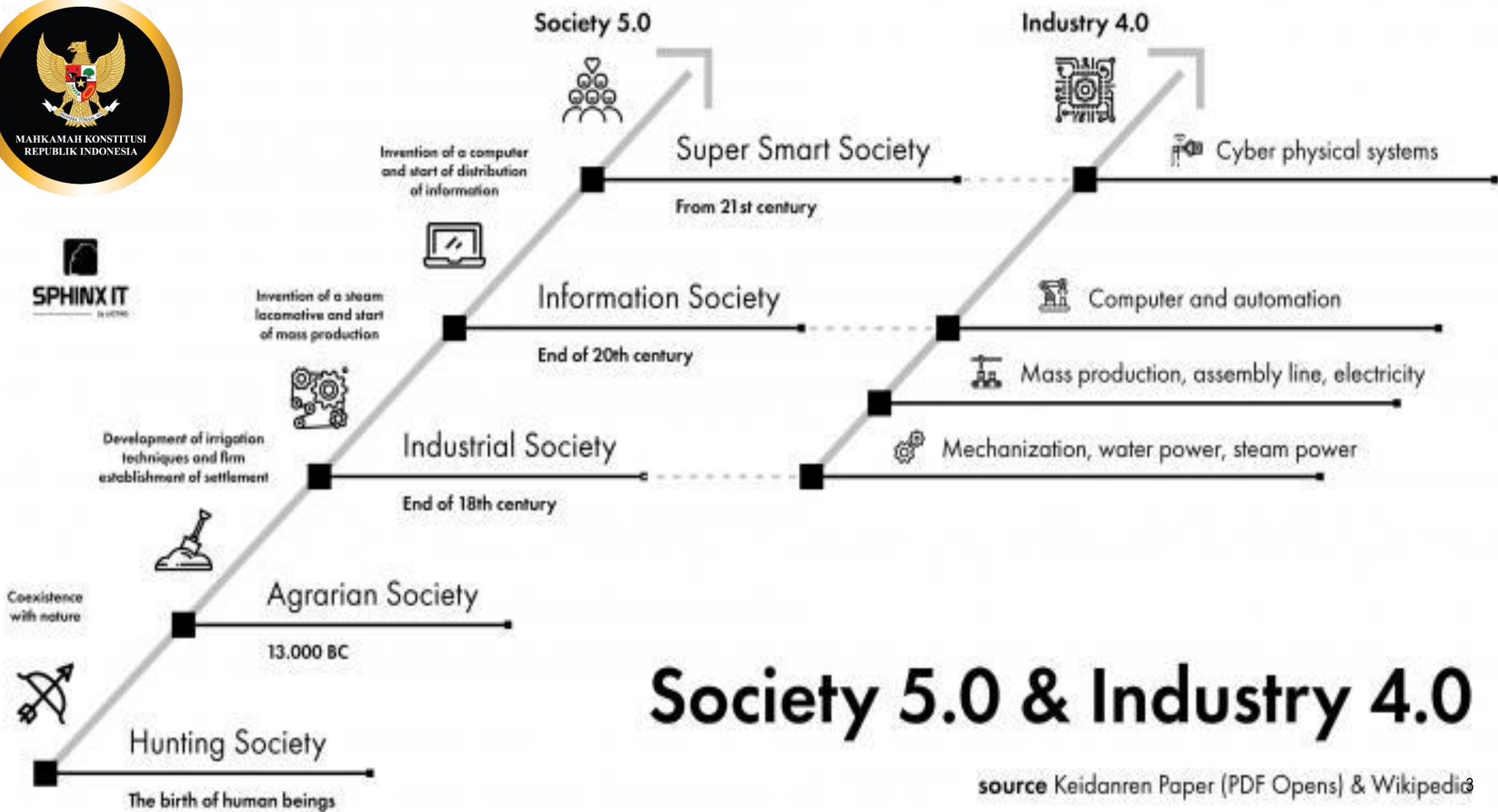


“CERAMAH PEMBUKAAN PADA FGD APHAMK”

Disampaikan pada Ceramah Pembukaan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
Cisarua, 28 Juli 2023

Arief Hidayat





Society 5.0 & Industry 4.0

source Keidanren Paper (PDF Opens) & Wikipedia



VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)

01. Volatility

Perubahan yang serba cepat Visi, tujuan, niat baik

02. Uncertainty

Ketidakpastian

03. Complexity

Kompleksitas situasi, kondisi yang rumit tidak bisa diselesaikan secara fragmentaris

04. Ambiguity

Ambigu realitas yang kabur
fleksibilitas , keluwesan

Dasar Hukum

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Konsekuensi Amanah pasal 24C ayat (1)
- Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of the State Ideology* sekaligus sebagai *The Guardian of the Constitution*.
- Mahkamah Konstitusi sebagai *The Soul Interpreter of The Constitution*.



Hubungan Pancasila dan UUD 1945



- Pancasila sebagai dasar negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai aliran pikiran dalam UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai ajaran konstitusionalisme Indonesia dalam UUD UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai identitas konstitusi Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai *weltanschauung*, filosofi dasar (*philosophische grondslaag*), dan ideologi yang melandasi UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai *grundnorm* (*staatsfundamentalnorm*) yang memvalidasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia

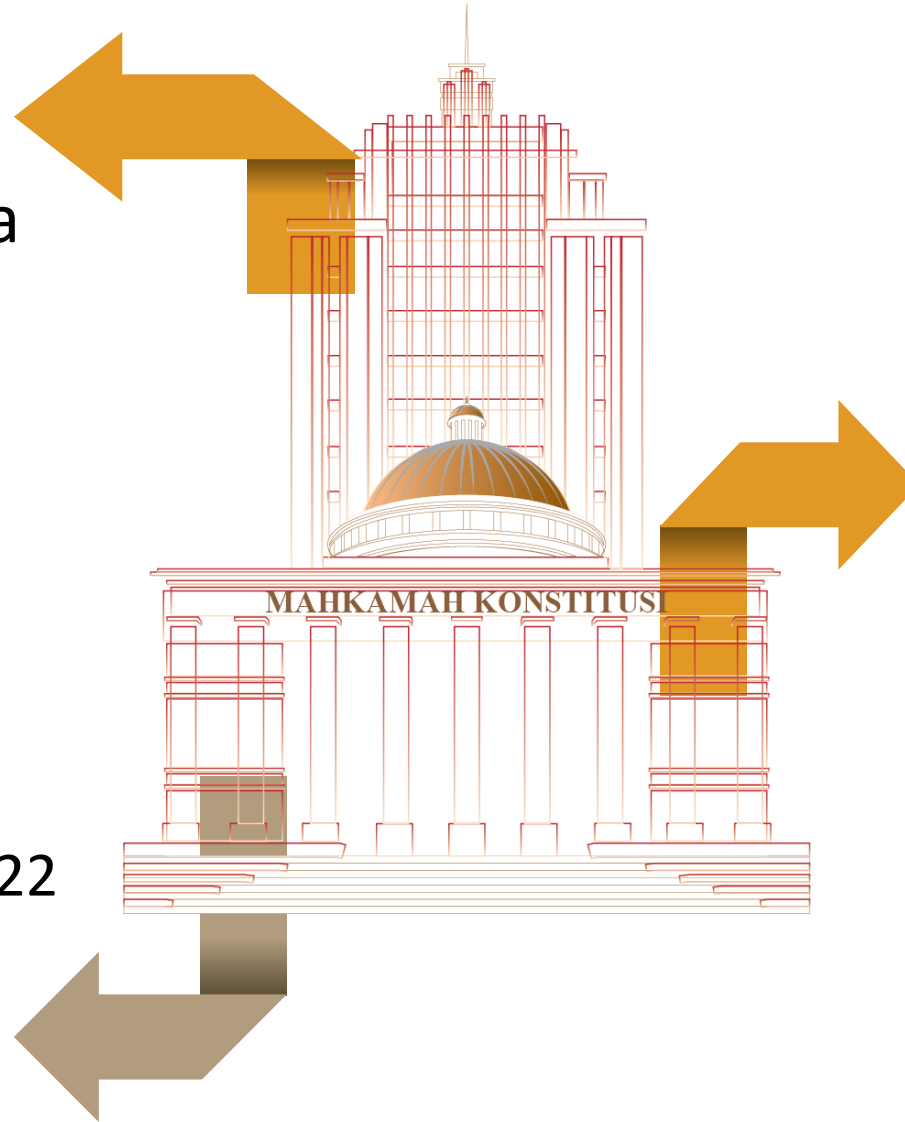


KONSTITUSIONALISME

- Ajaran tentang pemerintahan yang terbatas (*the limited government*)
- Konstitusionalisme suatu negara merefleksikan identitas konstitusi suatu bangsa
- Konstitusionalisme suatu negara mengandung *weltanschauung*, filosofi dasar, dan ideologi suatu negara
- Ada negara yang memiliki UUD, tetapi tidak mengandung ajaran konstitusionalisme (mis. Korea Utara, Myanmar)
- Ada negara yang melaksanakan ajaran konstitusionalisme, tetapi tidak memiliki UUD (mis. Inggris)

Contoh Kasus

Putusan No. 24/PUU-XX/2022 tentang perkawinan antar agama (UU No. 1/1974)

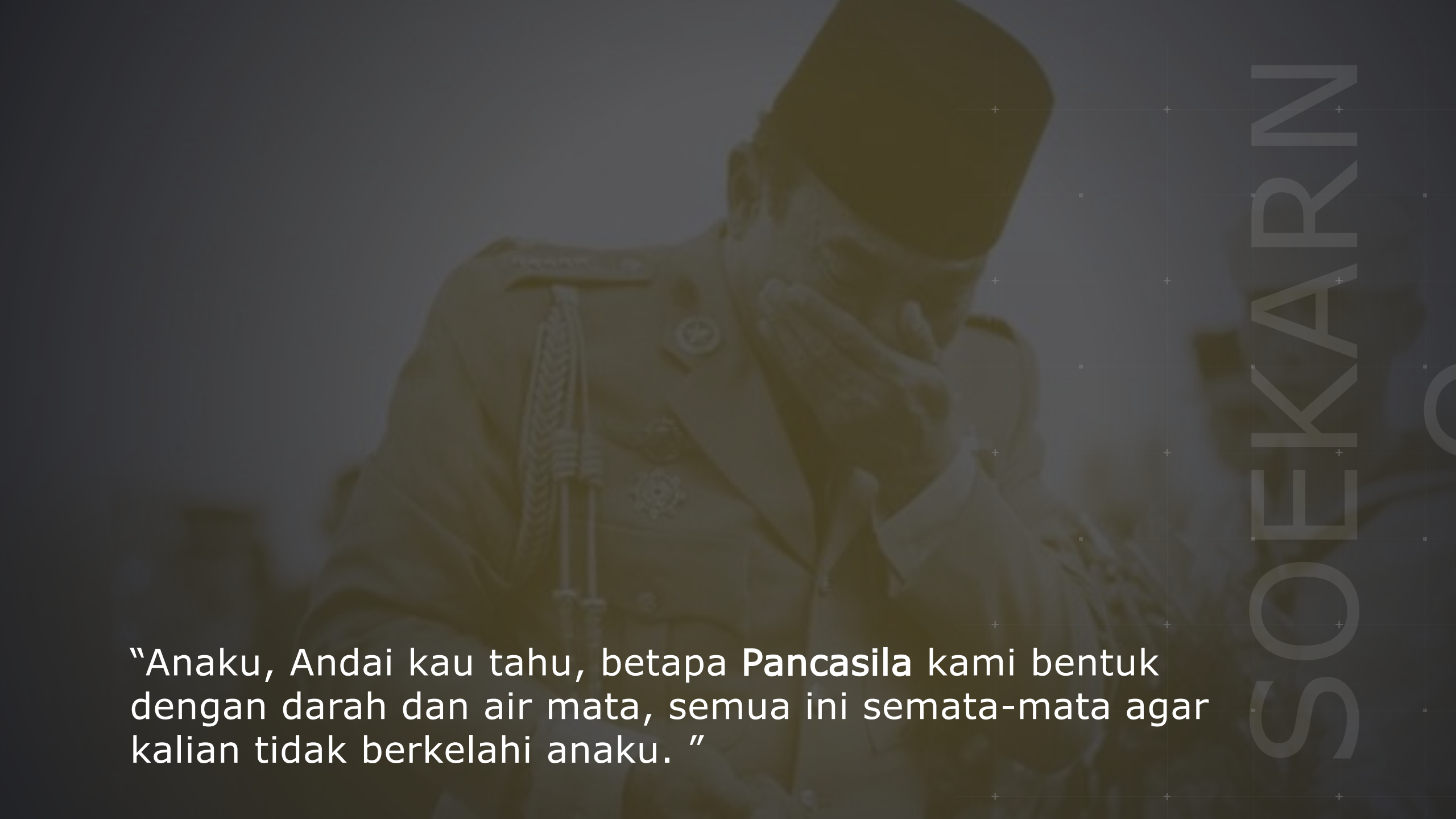


Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU 32/2004)

Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum (UU No. 17/2017)

Perkembangan terkini sistem ketatanegaraan Indonesia

1. Kecenderungan muncul oligarki dibidang Politik dan Ekonomi;
2. Terpusat kekuasaan pada satu tangan yaitu Pemilik modal, pemilik partai, pemilik media,
3. Menguatnya infrastruktur politik untuk mengisi Lembaga-Lembaga supra struktur politik.
4. Menguatnya ideologi individualis, liberalis dan kapitalis.



"Anaku, Andai kau tahu, betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anaku."

SOEKKARNO